

ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON**PERFORMANCE ANALYSIS OF THE SHOPPING BUDGET IN THE TOMOHON CITY FINANCIAL AND INCOME MANAGEMENT AGENCY**

Oleh:

Rexy R I Palimbongan¹^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

rexypalim@gmail.com

Abstrak: Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota tomohon merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dituntut untuk dapat melaksanakan efisiensi dan efektifitas anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota tomohon periode anggaran 2013-2017, yang disusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja yang telah dilakukan lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan. Dari beberapa analisis yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang positif dalam kinerja belanja. Dengan demikian menunjukkan bahwa kinerja belanja dinilai baik. Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kota tomohon sebaiknya meningkatkan realisasi belanja pada belanja modal, dan lebih mengefisienkan belanja operasi.

Kata kunci: kinerja belanja, laporan realisasi anggaran

Abstract: The financial management and regional revenue agency of tomohon city is one of the regional work units that are required to be able to implement budget efficiency and effectiveness. The purpose of this study was to determine the performance of the budget in the tomohon financial management and regional revenue agency for the 2013-2017 budget period, which was compiled using qualitative research methods. Research results show that the realization of expenditure that has been made is smaller than the planned budget. From some of the analyzes that have been carried out it shows positive results in spending performance. Thus indicating that shopping performance is considered good. The financial management and regional revenue agency of tomohon city should increase the realization of expenditure on capital expenditure, and more efficient operational expenditure.

Keywords: shopping performance, budget realization report

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Di era globalisasi sekarang ini, pengembangan kualitas kehidupan masyarakat yang merupakan bagian utama dari suatu bangsa dan negara membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah yang terintegrasi secara baik dari pusat hingga ke daerah. Di dalam penerapan otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Pengelolaan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan yang berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan kegiatan organisasi dan menunjukkan tujuan suatu organisasi atau badan. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai kejelasan sasaran anggaran yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas laporan keuangan terhadap masyarakat. Sektor publik di Indonesia mengenal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rancangan tersebut memuat pos-pos pendapatan dan belanja yang menjadi sasaran atau target yang hendak dicapai selama 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah pada suatu anggaran.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Selisih besaran antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan ini menjadi perhatian utama. Besaran angka tersebut secara tidak langsung mengungkapkan kapasitas pegawai dalam penyusunan anggaran.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah harus fokus dan berintegritas dalam menjalankan tuntutan ini. Dalam melaksanakan tuntutan tersebut pimpinan harus dapat melaksanakan pengawasan secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dan kebocoran. Data akuntansi merupakan salah satu jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut, karena melalui data ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dapat melakukan pembenahan dan pengembangan untuk mencapai optimalisasi kinerja anggaran belanjanya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui kinerja anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon periode anggaran 2013-2017.

Pengertian Akuntansi

Menurut Watung (2016) akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Sedangkan Hendra (2014) menyatakan bahwa akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya

Akuntansi Keuangan Daerah

PP. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten. *Output* berupa laporan keuangan dari Akuntansi Keuangan Daerah ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya.

Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 6 yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dariangka tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan alporan arus kas. Laporan keuangan merupakan rincian dari masing-masing akun transaksi yang saling berhubungan antara akun yang satu dengan yang lain.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Halim (2014: 24) adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran. Menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. Pengertian APBD juga terdapat dalam PP No. 58 tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: pendapatan daerah, belanja daerah, dan Pembiayaan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Herisistam (2015: 33) menyatakan kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Laporan Realisasi Anggaran

Siregar (2015: 82) menyatakan laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Dan menurut Hasanah dan Fauzi (2016: 17) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Penelitian Terdahulu

Mardiana (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis varians anggaran belanja pada tahun 2013 dan 2014 dinas perkebunan kabupaten musu banyuasin dapat dikatakan cukup efektif. Hanya saja untuk tahun 2015 persentase pencapaian hanya mencapai 81,51% yang secara otomatis dapat dikatakan kurang efektif. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas belanja pada tahun 2013 dan 2014 dinilai cukup efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja yaitu sebesar 91,17% dan 94,71%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2015 dinilai kurang efektif dalam melaakukan pengelolaan anggaran belanja karena hanya mencapai 81,51%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran belanja lebih kecil dari target anggaran.

Tantri dan Irmawati (2018) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) hasil analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik

Muryanti (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. Hasil penenelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif

Rahayu (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dankuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus

perhatian yang ingin dijelaskan. Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis tentang fakta-fakta dan fenomena-fenomena dari objek yang diteliti.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dengan rentang waktu penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2019 sampai April 2019.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka - angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. Selain itu penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data berupa visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data wawancara dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung dari perusahaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap aktivitas Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.

2. Dokumen

Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dalam penelitian ini kajian dokumen dilakukan dengan meminta langsung terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon pada Tahun 2016 bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tomohon No 3 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perda Kota Tomohon no 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, Namun pada tahun 2016 telah ditetapkan Peraturan Daerah no 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tomohon yang telah menyesuaikan dengan amanat Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dapat dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

Berdasarkan data yang berkaitan dengan Anggaran Belanja dan Realisasinya, maka dapat di hitung Varians Belanja selama 5 tahun berikut ini

Tabel 1. Analisis Varian Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

Belanja Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varian Belanja	Persentase
2013	20.802.735.316	18.352.407.987	2.450.327.329	88,22%
2014	20.635.925.789	19.142.779.512	1.493.146.277	92,76%
2015	16.795.382.917	15.856.438.126	938.944.791	94,41%
2016	23.672.923.385	21.570.501.971	2.102.421.414	91,12%
2017	25.826.420.375	23.566.098.907	2.260.321.468	91,25%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019

Pada tabel 1 memperlihatkan pada tahun 2013 persentase anggaran terealisasi 88,22% dari total anggaran belanja. Untuk tahun 2014 menunjukkan presentase anggaran terealisasi 92,76%, tahun 2015 persentase realisasi anggaran sebesar 94,41%, selanjutnya pada tahun 2016 persentase realisasi anggaran sebesar 91,12% dan tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase anggaran terealisasi sebesar 91,25% sampai dengan tahun 2017 varian belanja menunjukkan angka persentase yang cukup baik. Dalam hal ini berarti bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja yang dianggarkan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pertumbuhan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon selama Tahun 2013 sampai dengan 2017 berikut ini:

Tabel 2. Pertumbuhan Belanja Tahun 2013-2017

Belanja Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Pertumbuhan Belanja	Keterangan
2013	18.352.407.987		
2014	19.142.779.512	790.371.525	4,31%
2015	15.856.438.126	-3.286.341.386	-17,17%
2016	21.570.501.971	5.714.063.845	36,04%
2017	23.566.098.907	1.995.596.936	9,25%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019

Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa pertumbuhan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang negatif. Kecenderungan pertumbuhan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon fluktuatif, terlihat dari tahun 2013 sampai 2017 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 4,31%, -17,17%, 36,04% dan 9,25%.

Analisis Keceragaman Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja, serta bagaimana pemerintah memprioritaskan alokasi dana pada belanja secara optimal dan keberpihakan pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik dan lain-lain yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Daerah membelanjakan APBD yang diperuntukkan ke arah itu.

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

Hasil perhitungan belanja operasi terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perhitungan Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja		Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (%)
	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Total Belanja	
2013	15.502.651.987	18.352.407.987	84,47%
2014	17.014.178.802	19.142.779.512	88,88%
2015	15.406.239.126	15.856.438.126	97,16%
2016	19.840.253.921	21.570.501.971	91,98%
2017	21.249.197.907	23.566.098.907	90,17%
	Rata-rata		90,53%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019

Pada tabel 3 memperlihatkan bahwa analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017, yaitu untuk tahun 2013 sebesar 84,47%, tahun 2014 sebesar 88,88%, tahun 2015 sebesar 97,16%, tahun 2016 sebesar 91,98% dan pada tahun 2017 sebesar 90,17%. Dari analisis rasio ini terlihat pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan, namun mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Hasil perhitungan belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perhitungan Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja		Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (%)
	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Total Belanja	
2013	2.849.756.000	18.352.407.987	15,53%
2014	2.128.600.710	19.142.779.512	11,12%
2015	450.199.000	15.856.438.126	2,84%
2016	1.730.248.050	21.570.501.971	8,02%
2017	2.316.901.000	23.566.098.907	9,83%
	Rata-rata		14,83%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019

Pada tabel 4 memperlihatkan bahwa keseluruhan rata-rata belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2013-2017 memiliki rata-rata sebesar 14,83%. Dimana pada tahun 2013 rasionya sebesar 15,53%, tahun 2014 sebesar 11,12%, tahun 2015 sebesar 2,84%, tahun 2016 sebesar 8,02% dan pada tahun 2017 sebesar 9,83%. Dari keseluruhan belanja operasi terhadap total belanja rata-rata sebesar 14,83% dari total belanja dan digunakan untuk belanja modal, seperti belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.

Tabel 5. Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi
2013	20.802.735.316	18.352.407.987	88,22%
2014	20.635.925.789	19.142.779.512	92,76%
2015	16.795.382.917	15.856.438.126	94,41%
2016	23.672.923.385	21.570.501.971	91,12%
2017	25.826.420.375	23.566.098.907	91,25%
Rata-rata			91,55%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, 2019

Tabel 5 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon telah melakukan efisiensi belanja mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017 kurang dari 100 persen dimana semakin kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. APBD akan efisien jika rasionya kurang dari 100 persen dan sebaliknya.

Pembahasan

Analisis Varians Belanja

Kinerja belanja pemerintah daerah akan dinilai baik, apabila realisasi belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan (Mahmudi, 2007: 143). Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2013 menggunakan 88,22% dari jumlah yang dianggarkan, tahun 2014 menggunakan 92,76% dari jumlah yang dianggarkan dimana mengalami kenaikan sebesar 4,54% dari tahun 2013, kemudian pada tahun 2015 menggunakan 94,41% dari jumlah yang dianggarkan, dapat dilihat pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 1,65%, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 3,29% sehingga menggunakan 91,12% dari jumlah yang dianggarkan, lalu terjadi kenaikan sebesar 0,13% pada tahun 2017 sehingga penggunaan anggaran menjadi 91,25% dari jumlah yang dianggarkan.

Secara keseluruhan selama tahun 2013 sampai tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon memiliki rata-rata 91,55%, dengan demikian kinerja belanja dinilai baik. Dimana pada tahun 2013 sampai tahun 2017 menggunakan kurang dari 100% jumlah yang dianggarkan.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu yaitu seperti penelitian dari Tantri dan Irmawati (2018) yang menunjukkan bahwa analisis varians belanja Dinas Kebudayaan DIY tahun 2012 – 2016 menunjukan kinerja yang baik dan seperti penelitian dari Rahayu (2016) dimana dalam Dinas PU Bina Marga memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 8,11%. Walaupun pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang negatif. Kecenderungan pertumbuhan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon fluktuatif, terlihat dari tahun 2013 sampai 2017 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 4,31%, -17,17%, 36,04% dan 9,25%.

Analisis Kecerassian Belanja

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Berdasarkan perhitungan belanja operasi terhadap total belanja secara keseluruhan memiliki rata-rata sebesar 90,53% dari total belanja yang digunakan untuk belanja operasi, seperti belanja pegawai dan belanja barang. Dimana pada tahun 2013 menggunakan anggaran sebesar 84,47% dari total belanja, tahun 2014 menggunakan sebesar 88,88% dari total belanja, tahun 2015 menggunakan sebesar 97,16% dari total belanja, tahun 2016 menggunakan sebesar 91,98% dari total belanja dan pada tahun 2017 menggunakan sebesar 90,17% dari total belanja. Dari analisis rasio ini terlihat pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan, namun mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan.

Walaupun demikian analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon dikategorikan serasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Tantri dan Irmawati (2018) dimana hasil analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan DIY sudah melakukan harmonisasi belanja.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat bahwa keseluruhan rata-rata belanja modal terhadap total belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2013-2017 memiliki rata-rata sebesar 14,83%, artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan tidak serasi. Penggunaan sebesar 14,83% tersebut digunakan untuk belanja modal, seperti belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Dari uraian dan perhitungan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon masih memprioritaskan belanja operasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Analisis Efisiensi Belanja

Berdasarkan tabel perhitungan tingkat efisiensi belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon tahun 2013 menggunakan 88,22% dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk belanja daerah. Tahun 2014 sebesar 92,76% dari total anggaran belanja digunakan untuk belanja daerah. Tahun 2015 menggunakan 94,41% dari total anggaran belanja. Kemudian pada tahun 2016 menggunakan 91,12% untuk belanja daerah. Dan pada tahun 2017 menggunakan 91,25% dari total anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk belanja daerah.

Dari keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, hal ini berarti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2013 sampai tahun 2017 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis Variasi Belanja secara keseluruhan selama lima tahun, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon memiliki rata-rata sebesar 91,55%, dengan demikian kinerja belanja dinilai baik. Dimana pada tahun 2013 sampai tahun 2017 menggunakan kurang dari 100% jumlah yang dianggarkan.
2. Pertumbuhan belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 8,11%.
3. Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon sudah melakukan harmonisasi belanja. Hal ini dibuktikan dengan proporsi belanja operasi yang lebih besar dari belanja modal.
4. Berdasarkan analisis, dari keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, hal ini berarti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2013 sampai tahun 2017 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran.

Saran

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, sebaiknya meningkatkan realisasi belanja pada belanja modal, dikarenakan belanja modal berlaku untuk jangka panjang dan lebih mengefisienkan belanja operasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan menambah rasio-rasio keuangan lainnya dengan menggunakan beberapa periode tahun anggaran, agar lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Halim., dan Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.

Hasanah, N., Fauzi, A. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit in Media, Jakarta.

- Heizer, J., dan Render, B. 2015. *Manajemen Operasi*. Edisi Ketujuh buku satu. Salemba Empat: Jakarta.
- Hendra. (2014). *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa*. Jurnal EMBA. Vol. 2 No. 1. ISSN 2303-1174.
- Herisistam. 2015. *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Jakarta: UT Perpustakaan Digital.
- Mahmudi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mardiana (2017). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*. Vol. 6, No. 2. <https://jurnal.polsky.ac.id/index.php/acsy/article/view/163> Diakses pada 12 Februari 2019.
- Muryanti, K. 2017. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015. *Artikel Ilmiah FEB UMS*. Vol. 2, No. 1. <https://eprints.ums.ac.id/53164/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> . Diakses pada 12 Februari 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahayu, R. P. 2016. Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan., *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*. Vol. 1, No. 1. https://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_makro_manajemen/article/view/244. Diakses pada 10 Februari 2019.
- Siregar. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Kencana: Jakarta
- Tantri, S. N., dan Irmawati, P. 2018. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Vol. 1, No. 1. https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/download/3815/pdf_2 . Diakses pada 12 Februari 2019.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Watung, L.R. 2016. Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT. Bank Sulutgo Di Kota Manado. *Jurnal Emba* Vol.4 No.1. Issn 2303-1174.